

RINGKASAN EKSEKUTIF

Analisis Gender tentang Ekstremisme Kekerasan dan Dampak COVID-19 terhadap Perdamaian dan Keamanan di ASEAN



TENTANG LAPORAN INI

Laporan ini merupakan hasil kerja sama dan kemitraan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Indonesia, dan Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (UN Women). Penelitian ini dilaksanakan atas penugasan dari UN Women dan merupakan bagian dari proyek regional *Empowering Women for Sustainable Peace: Mencegah Kekerasan dan Meningkatkan Kohesi Sosial di ASEAN* dengan dukungan penuh dari Urusan Global Kanada dan Republik Korea. Penelitian ini dilakukan oleh Monash Gender, Peace and Security Center di Monash University. Penelitian ini juga didukung oleh informasi yang disediakan oleh kelompok multi-stakeholder, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil dari kawasan ASEAN. Temuan penelitian ini bertujuan untuk mendukung implementasi ASEAN Bali Work Plan 2019-2025 yang dikembangkan untuk mengoperasionalkan *ASEAN Regional Prevention of Violent Extremism Plan of Action*.

Pandangan yang diungkapkan dalam publikasi ini adalah pandangan penulis dan tidak mewakili pandangan dan kebijakan resmi UN Women, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi afiliasinya, atau Pemerintah Kanada atau Republik Korea. Desain dan presentasi materi dalam publikasi ini tidak menyiratkan ekspresi pendapat apa pun dari pihak UN Women terkait status hukum negara, wilayah, kota atau wilayah mana pun atau otoritasnya, atau mengenai penetapan batas atau garis depan wilayah. Daftar kesalahan atau ketidaktepatan yang ditemukan setelah peluncuran laporan ini dapat Anda temukan dalam situs web kami.

UCAPAN TERIMA KASIH

UN Women mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kanada dan Republik Korea atas kontribusi besar mereka untuk mendukung agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di kawasan ASEAN dan secara khusus untuk melakukan dan mempublikasikan penelitian ini.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim peneliti dari Monash Gender, Peace and Security Center di Monash University, Mark Harris (UN DPPA-DPO), Hernan Logo (UNOCT) dan Avezia Ariane dan Timothy Wilson (UNODC) atas kemitraan dan dukungan mereka.

Tim Penulis laporan: Alexandra Phelan, Irine Hiraswari Gayatri, Jacqui True, Amporn Marddent, Yolanda Riveros-Morales dan Sitte Janine Gamao

Bimbingan strategis dan kontribusi substantif: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MOWECP), Ketua ASEAN Committee on Women (ACW), Kantor Penasihat Presiden Filipina untuk Proses Perdamaian (OPAPP), Lembaga Internasional tentang Pemikiran dan Peradaban Islami Malaysia, Pembela Hak Asasi Manusia Thailand, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), Jamshed Kazi, Norul Mohamed Rashid, Ryce Chanchai, Cristina Fernandez Escorza, Hosianna Anggreni, Vu Thu Hong, Xinyue Gu, dan Yoomi Jun (UN Women)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bahwa radikalisisasi, pergeseran menuju ekstremisme kekerasan, di Asia Tenggara terjadi pada masa damai, ketika konflik telah mereda, dan/atau bahkan di negara-negara yang tidak mengalami konflik internal apa pun. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa ada perbedaan terkait keterlibatan perempuan dan laki-laki dengan konten dan organisasi ekstremis, terutama dalam konteks proses radikalisisasi, rekrutmen, dan partisipasi.¹

Laporan ini mengidentifikasi tren yang terus-menerus terjadi dan dinamika gender yang berubah-ubah terkait ekstremisme kekerasan dalam konteks pandemi COVID-19, berdasarkan survei terhadap pakar dan penelitian wawancara yang dilakukan antara Juli dan November 2021. Laporan ini juga menggambarkan bagaimana dan sejauh mana kebencian terhadap perempuan dan keyakinan bernada permusuhan memicu ekstremisme kekerasan di kawasan Asia Tenggara selama pandemi, sejauh mana kebencian terhadap perempuan dan sikap permusuhan di kawasan ASEAN memicu ekstremisme kekerasan, dan bagaimana semua ini mewujud dalam ruang offline. Laporan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:



Apa yang menjadi tren dan dinamika perubahan utama dari ekstremisme kekerasan dalam konteks COVID-19, termasuk terkait perekrutan, propaganda, dan/atau penyebaran informasi yang salah dan disinformasi untuk memicu keyakinan misoginis dan permusuhan (baik online maupun offline) untuk membenarkan dan melegitimasi kekerasan terhadap perempuan di kawasan ASEAN?



Sampai sejauh mana ruang offline memperkuat sikap permusuhan dan kebencian terhadap perempuan, yang pada gilirannya berpotensi semakin memicu ekstremisme kekerasan?



Apa hal-hal yang diperdebatkan antara perempuan dan laki-laki dalam komunitas yang terdampak oleh kelompok ekstremis kekerasan di kawasan ASEAN? Bagaimana cara perempuan dan laki-laki mengatasi atau melawan pengaruh ini secara berbeda? Apa dinamika gender dan apa konsekuensinya?

4

•• Ketika merancang dan mengimplementasikan kebijakan P/CVE yang responsif terhadap pendekatan sensitif gender, perspektif interseksionalitas harus disematkan/direfleksikan kedalam percakapan substantif di balik proses perancangan tersebut, dan partisipasi yang berarti harus disertakan selama perumusan kebijakan. Banyaknya inisiatif implementasi konkret P/CVE Rencana Aksi Nasional (RAN) di tingkat lokal, yang menandakan telah terjadinya koordinasi di berbagai tataran di antara Kementerian/Lembaga di tingkat pemerintah pusat dan daerah menunjukkan potensi diakuinya P/CVE sebagai agenda bersama sesuai dengan masyarakat yang terdampak ekstremisme kekerasan.²

Seperti yang dinyatakan oleh seorang pakar yang diwawancarai untuk penelitian ini:



Tidak ada kelompok ekstremis yang mendukung ideologi kesetaraan antara perempuan dan laki-laki



Dalam pesan dan strategi mereka, “kelompok ekstremis kekerasan selalu menempatkan perempuan sebagai penyelamat atau penyebab kondisi yang dianggap tidak bermoral.” Namun ada beberapa kelompok moderat yang mendukung kesetaraan gender sebagai kontra-narasi terhadap ideologi ekstremis dan ekstremis kekerasan. Hampir semua ahli sepakat bahwa konten intoleran online ini berbahaya bagi perempuan di ruang offline, dan bahwa COVID-19 telah mengakibatkan ketidakamanan yang lebih signifikan bagi perempuan yang terkena dampak ekstremisme kekerasan dalam hal radikalisasi, perekrutan, dan efek dari wacana online yang mempromosikan seksis. pandangan, kontrol dan penaklukan perempuan.

Ini termasuk melalui penyebaran informasi yang salah dan disinformasi, yang diamati oleh peserta meningkat selama COVID-19. Perilaku online tidak hanya memengaruhi peran, praktik, dan rekrutmen ekstremis yang kejam, tetapi juga mengakibatkan ketidakamanan di ruang offline, termasuk peningkatan risiko kekerasan seksual dan berbasis gender.

Meskipun ada kesamaan cara kelompok ekstremis kekerasan melakukan propaganda dan memanfaatkan media

sosial untuk merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, serta bagaimana mereka mendukung pandangan seksis terhadap perempuan, perbedaan tetap ada antara kelompok-kelompok ini, tergantung dari organisasi mereka sendiri, serta lingkungan geopolitik di sekitar wilayah operasi mereka dan ideologi yang dianut. Misalnya, walaupun pendekatan P/CVE yang ada umumnya dibuat dengan mengantisipasi ancaman ekstremis kekerasan yang ditimbulkan oleh jihadisme, mereka yang diwawancarai mengingatkan bahwa ekstremisme etno-nasionalis (seperti dalam kasus Malaysia) dan pemberontakan komunis (seperti dalam kasus Filipina) berpotensi juga menimbulkan risiko yang dapat segera timbul atau terjadi di masa depan, yang saat ini belum diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program yang ada. Karena itu, penting untuk mempertimbangkan bahwa sementara organisasi merekrut dan meradikalisasi perempuan dan laki-laki secara berbeda, norma-norma gender yang dominan ada di dalam ideologi yang dianut dapat mempengaruhi proses-proses ini melalui cara yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari pendekatan “satu ukuran untuk semua”.

Temuan studi ini perlu memberi masukan pada pengembangan kebijakan dan program P/CVE yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Asia Tenggara. Lebih dari separuh responden ahli setuju bahwa pertumbuhan misogini di ruang online dan sikap permusuhan terhadap perempuan diakomodir dalam kebijakan dan program P/CVE yang ada saat ini. Kebijakan yang lebih responsif gender akan dapat mengatasi dimensi spesifik gender terkait peningkatan radikalisme online serta dampaknya terhadap perekrutan laki-laki dan perempuan ke dalam ekstremisme kekerasan yang dilakukan secara off-line.

BERDASARKAN STUDI PENELITIAN, KAMI MENGUSULKAN REKOMENDASI BERIKUT UNTUK KEBIJAKAN DAN PROGRAM P/CVE DI KAWASAN ASEAN:

7

Kebijakan P/CVE harus didasarkan pada analisis sensitif gender terhadap penyebab radikalisme individu yang bertransformasi menjadi ekstremisme kekerasan. Termasuk di dalamnya pengakuan bahwa proses radikalisme dan pendorong menuju ekstremisme kekerasan dapat berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Dari data survei dan wawancara kami, kekhawatiran umum sering muncul bahwa pembuat kebijakan belum sepenuhnya mengakui bahwa proses radikalisme di kalangan perempuan dan laki-laki berbeda, meskipun mereka direkrut dan berpartisipasi dalam organisasi yang sama. Sederhananya, perbedaan potensial yang mendorong terjadinya radikalisme perempuan dan laki-laki tidak hanya berbeda, tetapi juga sangat terkait gender. Penting untuk dicatat, bahwa bagaimanapun, perempuan dan laki-laki tidak dapat diperlakukan secara monolitik, tetapi faktor-faktor yang mendorong laki-laki untuk bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan mungkin tidak sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan.

Penilaian risiko harus memasukkan indikator radikalisme spesifik gender laki-laki dan perempuan dan indikator kebencian terhadap perempuan dan sikap permusuhan dan dalam pemantauan indikator-indikator ini harus dilihat

sebagai indikator yang terkait namun berbeda jika dilihat dalam konteks dinamika konflik yang lebih luas. Penilaian ini memuat identifikasi di tataran individu, baik laki-laki maupun, yang memiliki sikap seksis yang mengandung permusuhan (yang berbeda dengan norma-norma gender diskriminatif yang ada dalam ideologi kelompok) sebagai mereka yang berisiko melakukan kekerasan. Penilaian ini harus responsif terhadap beragam ideologi yang ada di seluruh kawasan ASEAN.

2

Perumusan kebijakan P/CVE saat ini harus mempertimbangkan hasil analisis sensitif gender dari semua bentuk ekstremisme dan ekstremisme kekerasan dan harus membedakan antara ekstremisme etno-nasionalis, ekstremisme sayap kanan dan pemberontakan komunis di tempat-tempat yang tidak menempatkan agama dalam dimensi utama ideologi.

Ideologi sebagian besar organisasi ekstremis kekerasan mengandung dimensi gender secara inheren. Cara kelompok ekstremis kekerasan membangun norma gender, termasuk bagaimana kelompok dapat menghasilkan maskulinitas dan norma gender yang dapat memungkinkan atau membatasi partisipasi perempuan, tidak hanya penting dalam memahami kekerasan tetapi juga dalam menormalisasi perilaku tertentu. Misalnya, konstruksi norma gender dalam kelompok dapat “berdampak pada kemungkinan kekerasan perempuan ditolerir sebagai hal yang sah oleh kelompok teroris; tentang peran yang dibayangkan yang semestinya dimainkan perempuan; pada perilaku yang dianggap normal untuk laki-laki; dan tentang perlakuan terhadap perempuan sebagai musuh”.³

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan ancaman di negara-negara anggota ASEAN dan ideologi organisasi ekstremis serta cara-cara yang mereka tempuh agar dapat menarik perempuan dan laki-laki secara berbeda. Meskipun ekstremisme kekerasan jihadis terus menimbulkan ancaman tak berkesudahan di kawasan ASEAN, penting untuk juga menghitung ekstremisme kekerasan dan konflik yang ditimbulkan oleh kelompok sayap kanan, etno-nasionalis dan komunis dan strategi berbeda yang mereka pakai untuk merekrut dan mempertahankan keterlibatan perempuan dan laki-laki.

3

Perbedaan dampak terorisme pada perempuan dan anak perempuan harus diintegrasikan ke dalam kebijakan dan program P/CVE.

Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan konteks lokal mereka di seluruh kawasan ASEAN dan mengembangkan program yang berfokus pada perempuan dan anak perempuan yang secara khusus mencerminkan bagaimana dinamika gender berperan dalam radikalisasi, seksama memikirkan bagaimana memastikan stereotip gender yang tidak valid bahwa perempuan selalu menjadi korban atau bahwa mereka ditipu untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Hal ini terutama terjadi ketika memikirkan pemulangan

mereka yang secara aktif atau pasif terlibat dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) atau tinggal di wilayah pengaruh proto-negara mereka.

Perlu dicermati bahwa perempuan dan anak perempuan dapat menjadi korban, pelaku, pendukung, pemberi pengaruh, dan peserta aktif dalam organisasi teroris, yang memerlukan pemahaman yang kompleks dan beragam tentang berbagai faktor risiko. Semua ini lebih lanjut berdampak pada dinamika komunikasi online/offline yang terutama meningkat selama pandemi COVID-19, saat penggunaan media sosial oleh perempuan dan keterlibatan mereka dalam obrolan dan forum grup – termasuk forum online perempuan – selama keharusan tinggal di rumah diberlakukan membuat perempuan semacam mendapatkan dorongan untuk bergabung dengan organisasi ekstremis kekerasan. Selain itu, pelatihan online mengenai keselamatan yang peka gender dapat direkomendasikan untuk petugas keamanan dan intelijen tentang cara mengidentifikasi sikap seksis yang bermusuhan yang terjadi dalam platform online.

4

Program P/CVE harus mendukung pengembangan kontra-narasi melawan ekstremisme kekerasan dan mengedepankan suara perempuan serta pengalaman misogini

– termasuk pengalaman mereka yang sebelumnya terlibat dengan organisasi ekstremis dan mereka yang menjunjung kesetaraan gender untuk menentang narasi misoginis. Beberapa peserta dalam penelitian kami mengidentifikasi bahwa organisasi ekstremis kekerasan di seluruh wilayah berusaha untuk tidak melegitimasi perempuan dalam posisi sebagai pemimpin. Suara perempuan dan kontra-narasi melawan ekstremisme kekerasan harus diperkuat oleh para pemimpin di masyarakat, OMS dan pemerintah, dan integrasi semua elemen ini harus disertakan dalam inisiatif dukungan dan rujukan dan pelatihan e-safety yang sensitif gender dalam bentuk digital.

Pada saat yang sama, pembuat kebijakan harus mengakui bahwa kontra-narasi juga berpotensi tidak langsung mengorbankan atau menciptakan kerentanan bagi perempuan. Pembuat kebijakan dan pemimpin tidak hanya harus memperkuat suara perempuan dan mengangkat kontra-narasi, tetapi mereka dan organisasi mereka juga harus menjadi teladan dalam menantang sikap seksis yang bermusuhan. Karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk melibatkan OMS dan kelompok perempuan dalam merancang kontra-narasi ini, karena mereka ini lah yang paling memiliki pengetahuan yang luas dalam memahami isu setempat yang dapat memicu timbulnya ekstremisme kekerasan dan mereka inilah juga yang dapat menawarkan solusi alternatif di tingkat masyarakat.

5

Pembuat kebijakan harus mendengarkan dan melibatkan komunitas yang ada di sekitar kelompok-kelompok ekstremis kekerasan.

Penting untuk melibatkan perempuan dan OMS yang memang sudah berada di garis depan aktivitas ekstremis kekerasan, yang memahami konteks lokal, memiliki kontak lokal dan memahami isu-isu lokal baik yang nyata maupun yang dianggap ada. Strategi P/CVE yang dibuat untuk seluruh kawasan memang cenderung bersifat umum, dan penelitian kami menemukan bahwa strategi ini perlu dibuat tidak hanya lebih spesifik terkait pengalaman gender perempuan dan laki-laki, tetapi juga pada beragam ideologi ekstremis dan lingkungan spesifik yang ada di sekitar mereka.

Inisiatif dan organisasi perdamaian di tingkat akar rumput dapat memainkan peran kunci dalam ruang P/CVE dan menjembatani kesenjangan antara pemerintah, pembuat kebijakan, dan masyarakat lokal. Bahkan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini secara bersamaan dapat berkontribusi meningkatkan akuntabilitas lembaga pemerintah dan kementerian – termasuk untuk upaya melakukan pengarusutamaan gender – dan berpotensi mengurangi kerentanan masyarakat yang berisiko. Selain itu, hal ini dapat diperluas untuk mencakup fokus khusus pada reformasi dan pelatihan sektor keamanan.

Salah satu cara organisasi sektor keamanan melawan seksisme yang memuat sikap permusuhan dan kebencian terhadap perempuan yaitu dengan menonjolkan angkatan kerja yang inklusif, menentang impunitas atas kekerasan berbasis gender dan menangani kekerasan dan pelecehan seksual di organisasi mereka sendiri – yang sering menjadikan perempuan dan penganut agama minoritas sebagai sasaran mereka. Masyarakat perlu menyaksikan adanya sektor keamanan yang inklusif dan responsif terhadap keprihatinan dan kebutuhan mereka dan yang tidak memprovokasi ekstremisme.

6

Perumusan RAN P/CVE bisa sangat terlembaga, tetapi tidak harus kaku. Ini bisa menjadi proses partisipatif, dengan keterlibatan tidak hanya dari organisasi kementerian tetapi juga dari OMS.

Perumusan RAN P/CVE yang terhubung ke kerangka nasional Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS) sangat penting untuk mengatasi dinamika misogini dan daya tarik ekstremisme kekerasan, terutama sikap seksis dan maskulinitas dan feminitas yang dibangun secara sosial yang memberikan lahan subur bagi tumbuhnya radikalisme dan kekerasan. Studi kasus kami tentang penyusunan RAN P/CVE Indonesia, dan implementasi yang sedang berlangsung diharapkan dapat memberikan pelajaran yang dapat membantu pengembangan rencana aksi lainnya di seluruh kawasan.

Sebagaimana diidentifikasi dalam laporan ini, beragamnya inisiatif implementasi RAN P/CVE di tingkat lokal karena adanya koordinasi multilevel antara lembaga lokal dan nasional, memungkinkan diangkatnya P/CVE sebagai agenda yang

diusung bersama oleh pemerintah dan masyarakat di tataran akar rumput. Pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa penyusunan RAN P/CVE akan menyertakan aspek interseksionalitas dan perspektif yang beragam dalam perumusannya. Upaya nyata harus dilakukan untuk memastikan kontribusi OMS dalam bentuk pengakuan terhadap keberadaan dan keterwakilan mereka dengan mendengarkan suara dan pengalaman mereka proses penyusunan. Proses ini akan memperlihatkan partisipasi signifikan mereka, sekaligus terciptanya peluang untuk mendiskusikan dan memperdebatkan konsep-konsep kunci, termasuk gender, yang sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan strategi P/CVE dan kebijakan P/CVE yang khusus dikembangkan untuk tujuan ini.

ENDNOTES

- 1 Johnston M., True, J., Gordon, E., Chilmeran, Y. and Riveros-Morales, Y. (2020), "A Gender Sensitive approach to Empowering Women for Peaceful Communities." Research Report, Monash Gender, Peace and Security Centre and UN Women, <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/05/academic-paper-a-gender-sensitive-approach-to-empowering-women-for-peaceful-communities>
- 2 Contoh-contoh terbaik terbaru: (1) Provinsi Jawa Barat menandatangani rancangan Rencana Aksi Daerah P/CVE yang dibentuk bersama oleh AMAN dan Institut Perempuan dan (2) Penyerahan rancangan "GM dalam Penyusunan RAD P/CVE" kepada BNPT oleh organisasi yang sama.
- 3 Pearson, E., Winterbotham, E. and Brown, K.E (2020), *Countering Violent Extremism: Making Gender Matter*, Palgrave Macmillan, p.35.

